

# KIPRAH KOMANDO PASUKAN SANDHI YUDHA DALAM OPERASI MILITER DI INDONESIA TAHUN 1971-1985

Oleh:  
**Septian Minurdin dan Agus Mulyana<sup>1</sup>**

## ABSTRACT

*Research's background in this study was to investigate Indonesia's Special Forces formation and military operation conducted by Indonesia Special Forces. After the Proclamation of Independence. Indonesia had no official military forces. At that time, military forces were derived from former independence fighters with a non-formal organization. Indonesia absolutely needed the military forces since the country encountered an attempts of disintegration namely rebellion in many provinces. After military forces established, Indonesia apparently could not overcome the domestic issue, therefore it was very essential to form Special Forces that could conduct military operation more effectively and efficiently. Problem formulation in this research is "how was the role of Sandhi Yudha Forces Command in conducting a military operation in Indonesia from 1971 to 1985?". The study used the historical method, with four research procedure that are heuristic, critic, interpretation, and historiography. Moreover, literature study by analysed relevant sources was applied. The study research revealed, Firstly, Indonesia's Special Forces was formed owing to the needs of a military operation in coping rebellions after Indonesia's independence. Secondly, after the formation, Indonesia's Special Forces has undergone numbers of re-organization that aim to improve the needs and system organization. These act as an effect from the development of forces and country ability in funding Special Forces' institution. Thirdly, after re-organization process between 1971 to 1985, Indonesia's Special Forces has conducted numbers of combat and non-combat military operations, such as Valey X Expedition in West Irian, the quell of Communist Group in West Kalimantan and Hostages' Rescuing Operation of Garuda Airline DC-9-WOYLA in Don Muang Airport, Thailand.*

**Keywords:** *Sandhi Yudha Forces Command, Indonesia's Army Special Forces, Reorganization, Combat and Non-Combat Military Operation*

## PENDAHULUAN

Sebuah negara yang berdaulat tentunya memiliki perangkat negara yang lengkap. Selain harus memiliki pemerintahan, wilayah dan penduduk negara yang

berdaulat juga harus memiliki angkatan bersenjata guna menunjang pertahanan dan stabilitas keamanan dalam negeri. Setelah Indonesia merdeka, negara yang baru lahir ini mengalami kendala dalam

---

<sup>1</sup>Septian Minurdin adalah mahasiswa pada Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Agus Mulyana adalah dosen pembimbing I. Penulis dapat dihubungi di email : eaglegolden906@gmail.com.

pembentukan angkatan bersenjata. Banyaknya pasukan yang tidak terorganisir oleh negara yang baru merdeka, membuat banyak friksi dalam proses pembentukan angkatan bersenjata yang resmi dibawah pemerintah. Pada akhirnya tentara yang menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah gabungan dari beberapa pasukan militer seperti KNIL, PETA dan Laskar-laskar bentukan masyarakat yang mulanya dibentuk untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang di Indonesia.

PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 mengumumkan terbentuknya sebuah badan yaitu “Badan Penolong Kurban Perang” yang secara keorganisasian mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di dalam Undang-Undang, fungsi dari BKR secara samar-samar disebutkan “memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan” (Sundhaussen, 1986, hal. 11). Dari pernyataan diatas terlihat jelas bahwa awal berdirinya angkatan bersenjata di Indonesia tidak memiliki fungsi untuk berperang melawan ancaman negara, melainkan hanya untuk menjaga keamanan dalam negeri saja. Melihat masyarakat Indonesia yang banyak sekali memiliki latar belakang pendidikan militer ini, memungkinkan pemerintah Indonesia pada saat itu membentuk suatu angkatan bersenjata yang secara tugas tidak hanya untuk menjaga keamanan dalam negeri saja, melainkan juga untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman luar yang mengganggu kedaulatan Indonesia.

Indonesia yang memiliki perjuangan kemerdekaan dengan sistem diplomasi dan militer membuat negara ini memiliki banyak organisasi militer, hal ini menyebabkan terganggunya karakteristik

organisasi militer di Indonesia dan banyaknya organisasi bersenjata di luar institusi formal. Oleh karena itu pemerintah memusatkan tenaga untuk merubah unit-unit militer yang berkomitmen rendah menjadi hierarki militer yang efektif (Cribb, 2010, hal.140). Dengan adanya hal ini menjadikan organisasi militer lebih terpusat dan terstruktur.

Langkah pertama dalam rangka penyempurnaan organisasi ialah dengan mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Pergantian nama itu terjadi pada tanggal 1 Januari 1946 dan pada tanggal 25 Januari 1946 berganti kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Nama itu dianggap lebih cocok untuk nama tentara dari sebuah Negara yang merdeka (Imran,1983, hal.80). Pergantian nama tersebut untuk mengantisipasi masuknya tentara sekutu ke Indonesia, kemudian tentara diberi tugas tidak hanya menjaga keamanan dan ancaman dalam negeri saja, melainkan juga memiliki peran untuk menjaga ancaman dari luar negeri.

Menurut Matanasi (2011, hal.35) perwira militer pribumi dibandingkan dengan perwira militer Eropa jumlahnya hanya 5 persen dari jumlah keseluruhan perwira. Jumlah bintangara dan prajurit pribumi adalah 60 persen dari seluruh prajurit KNIL, jumlah tentara orang Eropa setelah perang kemerdekaan adalah 307 perwira dan 5.699 orang bintangara dan prajurit, sedangkan jumlah perwira pribumi hanya 37 perwira dan 7.206 bintangara dan prajurit (Matanasi, 2011, hal.21). Melihat dari data itu sudah banyak orang pribumi yang memiliki kemampuan militer yang cukup baik, orang-orang pribumi yang pernah mengikuti pelatihan

militer dengan KNIL ini awalnya dengan mudah membentuk suatu pasukan merupakan tentara yang berada dibawah bersenjata. komando kerajaan Belanda, tetapi setelah Indonesia merdeka orang-orang yang pernah mengabdikan pada KNIL secara tidak langsung menjadi bagian dari tentara Indonesia.

Penguasa Jepang mendirikan sejumlah organisasi militer dan semi-militer untuk membantu tentara pendudukan apabila terjadi penyerbuan oleh sekutu, yang paling penting diantara pasukan itu ialah PETA (Pembela Tanah Air) yang merupakan pasukan sukarela untuk membela tanah Jawa, yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1945 yang terdiri dari 96 batalyon di Jawa dan Bali. PETA memperoleh pendidikan dasar infanteri dan indoktrinasi ala samurai untuk menanamkan semangat yang tinggi (Sundhaussen, 1986, hal.3).

Tiap-tiap kelurahan mempunyai barisan muda yakni KEIBONDAN sebagai pembantu Polisi dalam pertahanan Sipil, SEINENDAN adalah barisan pemuda, sedangkan SYUSINTAI adalah barisan Pelopor. Ketiga organisasi semi militer ini berada dibawah pimpinan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hooke Kai) yang didirikan oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1944 (Disjarah TNI-AD, 1978, hal.16-17). Berbeda dengan pendudukan Belanda, Jepang menggunakan sistem semi militer yang diberlakukan di masyarakat Indonesia, yang menyebabkan di Indonesia memiliki pertahanan sipil. Pendudukan Jepang juga berpengaruh terhadap pembentukan tentara Indonesia karena masyarakat Indonesia yang berlatar belakang PETA memiliki kemampuan militer serta para pemuda yang dibiasakan hidup secara semi militer membuat pemerintah Indonesia

Latar belakang masyarakat Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda dan Jepang yang menerapkan pendidikan militer, membuat pemerintah Indonesia tidak sulit dalam mencari tokoh untuk memimpin angkatan bersenjata yang mulai dibentuk. Para sekutu mendapatkan perlawanan dari angkatan bersenjata Indonesia, pada masa revolusi banyak sekali peristiwa perlawanan terhadap tentara sekutu. Tetapi perjalanan masa revolusi di Indonesia tidak hanya dilakukan dengan kontak senjata saja tetapi juga dengan perundingan-perundingan untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Banyak sekali peristiwa heroik terjadi pada saat revolusi seperti peristiwa 10 November, Palagan Ambarawa, Perjuangan perang Jenderal Soedirman, Bandung Lautan Api, Peristiwa Bojong Kokosan dan peristiwa lainnya.

Pada awal tahun 50-an Indonesia sudah diakui secara hukum Internasional, dengan adanya pengakuan di dunia Internasional ini Indonesia menentukan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa ini Indonesia banyak mengalami permasalahan baik dalam internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan. Banyak persaingan politik dalam pemerintahan sehingga mengakibatkan banyak pergantian kabinet, pada masa ini juga Indonesia melakukan sistem kepartaian dan melakukan pemilu untuk pertama kalinya.

Di antara masalah-masalah yang dihadapi negara baru-baru ini, ialah apa yang akan dilakukan dengan tentara. Inilah persoalan-persoalan yang mendominasi sebagian besar sejarah Indonesia setelah

tahun 1950, pada tahun 1950 politisi sipil beranggapan bahwa untuk menentukan urusan militer adalah hak mereka (Ricklesf, 1991, hal. 359). Melihat keadaan politik yang sangat kisruh, tentara mengambil sikap dengan melakukan reorganisasi dan rasionalisasi atas perintah dari kabinet yang sedang berkuasa dengan tujuan agar militer lebih baik dalam berorganisasi.

Semakin matangnya angkatan bersenjata membuat kebutuhan dalam organisasi angkatan bersenjata semakin banyak. Untuk menyempurnakan organisasi diangkatan bersenjata, maka dari itu angkatan bersenjata Indonesia membentuk beberapa lembaga militer yaitu: angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Selain itu juga untuk mempermudah dan melancarkan tugas, lembaga militer di atas membentuk suatu Pasukan Khusus yang dimana pada waktu itu dibutuhkan untuk melakukan operasi militer secara cepat dan efektif.

Pasukan Khusus di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Tentara bentukan pemerintah Hindia Belanda adalah KNIL yang merupakan pasukan militer yang memiliki kemampuan khusus yang diadopsi oleh Indonesia. Ide Alex Kawilarang membentuk pasukan elit di lingkungan Angkatan Bersenjata Indonesia sudah ada sejak ia menjabat sebagai Panglima TT/Sumatera. Ide tersebut terinspirasi setelah ia mengetahui kemampuan pasukan komando Inggris yang lebih dikenal dengan pasukan "green berrets" pada saat Perang Dunia II, sehingga ia berkeinginan untuk membentuk Pasukan Komando yang memiliki kemampuan serupa (Israr, 2010, hlm. 237). Pembentukan Pasukan ini sudah dilakukan oleh Alex Kawilarang

ketika menjabat sebagai Panglima TT/Sumatera Utara, beliau membentuk satu kompi dibawah pimpinan B. Nainggolan, kompi ini hanya melakukan pendidikan dan pelatihan selama satu bulan saja karena Alex Kawilarang dipindahtugaskan dari Panglima TT/Sumatera Utara untuk menajabat sebagai Panglima TT/Indonesia Timur. Setelah menjadi Panglima TT/Jawa Barat Alex Kawilarang dihadapkan pada tugas berat yaitu pemberontakan DI/TII yang ada di Jawa Barat.

Pada awal pemberontakan Tentara Islam, semula Pasukan Siliwangi belum menemukan taktik yang jitu. Kolonel Alex Kawilarang menilai pasukan yang diberi tugas untuk menumpas tentara Kartosoewirjo terlalu besar. "Mobilitasnya menjadi kurang dan lamban sekali," kata Alex Kawilarang dalam biografinya. Alex Kawilarang mengakui kesulitan dalam menundukan Kartosoewirjo kendati di awal pemberontakan dia berjanji akan menumpas gerakan pemberontakan itu dalam 6 bulan saja. Dia kemudian meminta pasukannya membentuk tim patroli dalam jumlah kecil, tapi lebih cepat dalam pergerakannya. "Cukup satu peleton saja, tapi harus terus bergerak, baik siang maupun malam" (TEMPO, 2015, hal. 5). Melihat situasi ini mengharuskan Alex Kawilarang membentuk pasukan kecil tetapi memiliki kemampuan untuk melakukan penyerpagan secara cepat, efektif dan efisien.

Dengan persiapan yang seadanya akhirnya Panglima TT III/SLW Kolonel A.E. Kawilarang mengeluarkan Instruksi No. 55/Insr/PDS tertanggal 16 April 1952 tentang pembentukan dan penetapan Kesatuan Komando Tentara dan Teritorium III, disingkat Kesko TT III.

Kemudian berdasarkan surat perintah penetapan panglima No. 21/SPRNT/PDS/1952 Tanggal 18 April 1952, sebanyak 27 orang perwira, bintara, dan tamtama di lingkungan TT III/SLW diorganikan ke dalam Kesko TT III yang sebagian diantara mendapatkan tugas yang rangkap sebagai pelatih untuk melengkapi organisasi dan membantu tugas Kesko TT/III (Disjarah, 2015, hlm. 21-23). Tetapi dalam membentuk pasukan elit, Alex Kawilarang tidak sendirian beliau dibantu oleh Slamet Riyadi sebagai orang yang menyampaikan gagasan ketika penumpasan RMS dan juga Idjon Djambi sebagai pelatih pasukan elit TNI AD di lingkungan Jawa Barat saja.

Kondisi Indonesia pada tahun 1952-1961 merupakan periode dimana militer Indonesia mengalami pendewasaan diri sebagai organisasi bentukan baru. Pada tahun ini pula pembentukan pasukan kecil yang dilatih khusus agar memiliki kemampuan di atas rata-rata dilakukan. Pada mulanya pasukan ini dilatih di lingkup Jawa Barat saja karena untuk menumpas DI/TII di Jawa Barat.

Pada tahun 1952 juga terjadi reorganisasi dan rasionalisasi hal ini menyebabkan Angkatan Darat menyempurnakan organisasi Pasukan Khususnya dengan mengubah nama menjadi Korps Komando Angkatan Darat (KKAD) yang kemudian pada tahun 1959 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Pada tahun 1966 satuan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD (PUSPASSUS TNI AD), berikutnya pada tahun 1971 nama satuan ini berganti menjadi Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha).

Berangkat dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti pun ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses pembentukan Pasukan Khusus di Indonesia khususnya Pasukan Khusus Angkatan Darat serta perannya dalam melakukan operasi militer. Masalah utama yang diangkat dari penelitian ini adalah “bagaimana Kiprah Komando Pasukan Sandhi Yudha dalam Operasi Militer di Indonesia? Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yaitu: (1) apa yang melatarbelakangi pembentukan Pasukan Khusus? ; bagaimana proses pembentukan Komando Pasukan Sandhi Yudha? ; (3) operasi militer apa saja yang telah dilakukan oleh Komando Pasukan Sandhi Yudha ?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian historis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Heuristik, atau pengumpulan sumber sejarah merupakan tahapan untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan data, fakta dan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Sumber-sumber sejarah itu bisa berupa dokumen, arsip, buku dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Langlois dan Seignobos (2015, hlm. 25) yang menyatakan bahwa sejarawan bekerja berdasarkan dokumen. Dokumen-dokumen tersebut adalah jejak pikiran dan perbuatan yang telah ditinggalkan oleh orang-orang masa lampau. Tidak ada dokumen, berarti tidak ada sejarah. Peneliti pun mendapatkan buku

dari berbagai perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), perpustakaan Dinas Sejarah TNI-AD, Perpustakaan PUSDIKLATPASSUS, Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain itu buku yang digunakan oleh peneliti adalah buku milik koleksi pribadi dan hasil penelusuran internet. Oleh karena itu penulis memiliki koleksi buku pribadi yang dimanfaatkan untuk menunjang penulisan penelitian ini diantaranya: buku Politik Militer Indonesia, buku Metodologi Sejarah, buku Indonesian Special Forces, buku Operasi Sandhi Yudha, buku Prajurit para Komando, buku biografi Prabowo Subianto serta beberapa artikel dari media cetak. Tentunya buku-buku dan sumber cetak tersebut dapat membantu penulis dalam penulisan penelitian ini.

2. Kritik Sumber, merupakan proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga dapat disajikan dalam bentuk cerita sejarah (Ismaun, 2005, hlm. 35). Dalam proses kritik tersebut terbagi lagi menjadi dua tahap yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah proses pengujian terhadap sumber sejarah dari aspek material seperti bahan dan bentuk sumber, umur dan bentuk sumber dan lain sebagainya (Ismaun, 2005 hlm. 50). Dalam proses kritik eksternal tersebut, penulis hanya melakukan kritik terhadap arsip saja, sedangkan untuk buku tidak dilakukan kritik eksternal karena buku itu sudah melewati verifikasi yang cukup ketat.

Sedangkan kritik internal adalah proses pengujian terhadap sumber sejarah dari segi aspek isi atau konten sumber sejarah tersebut. Dalam kritik eksternal tersebut, peneliti lebih menekankan pada buku-buku yang digunakan. Peneliti pun membandingkan antara satu buku dengan buku lainnya, tujuan dari uji banding tersebut adalah mencari kebenaran fakta yang terkandung di dalam buku tersebut. Seperti buku A.E Kawilarang untuk Merah Putih yang merupakan buku biografi yang ditulis oleh Ramadhan K.H. Alasan penulis menyebutkan buku ini layak menjadi sumber karena dalam proses pembuatan buku ini melibatkan langsung A.E Kawilarang sebagai sumbernya, dilihat dari tahun terbit cetakan pertama yaitu pada tahun 1988, dimana saat itu Alex Kawilarang masih hidup dan masih bisa menceritakan pengalaman hidupnya kepada penulis buku, maka peneliti berkesimpulan bahwa buku ini layak dijadikan sumber dalam penulisan skripsi ini.

3. Interpretasi, merupakan proses penafsiran terhadap sumber-sumber yang sudah dilalukan proses kritik secara internal maupun eksternal. Dalam proses ini, seorang sejarawan harus mencurahkan daya pikirnya dalam proses penafsiran tersebut. Melakukan analisis- analisis secara kritis dan mendalam terhadap sumber-sumber yang sudah didapatkan di lapangan. Penulis melakukan penafsiran terhadap beberapa sumber yang telah ditemukan. Disini penulis melakukan beberapa komentar dan pandangan terhadap sumber-sumber yang didapatkan.

4. Historiografi, atau penulisan ulang tahun 1950-an. Melihat kondisi negara sejarah merupakan tahapan akhir dari proses penelitian sejarah. Dalam hal ini, proses penyusunan hasil penelitian akan disusun dalam suatu karya ilmiah. Abdurhaman (2007, hlm.76) menjelaskan bahwa historiografi dapat dikatakan sebagai pemaparan, penulisan dan pelaporan yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam menuliskan suatu peristiwa sejarah itu, maka seorang penulis harus bisa mengeluarkan segala kemampuannya. Kemampuan itu tidak hanya berupa keterampilan menulis seperti teknik penggunaan berbagai macam kutipan saja tetapi ia harus bisa menuangkan pikiran-pikiran kritisnya, imajinasinya untuk menghasilkan suatu sintesis dalam suatu penulisan yang utuh yaitu historiografi (Sjamsuddin, 2012, hlm. 121). Penulis menggunakan sistem penulisan yang mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia yang diterbitkan tahun 2016. Hasil penelitian ini kemudian ditulis dalam sebuah karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul “Kiprah Komando Pasukan Sandhi Yudha dalam Operasi Militer di Indonesia Tahun: 1971-1985”.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan Pasukan Khusus ini sangat diperlukan oleh Negara Indonesia sebab perkembangan sejarah membuktikan bahwa Pasukan Khusus tersebut harus dimiliki oleh Indonesia guna menumpas gerakan separatis yang marak pada dekade

yang sedang terancam dengan maraknya aksi pemberontakan membuat pemerintah mau tidak mau harus melaksanakan operasi militer yang menimbulkan dampak jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Dari evaluasi operasi militer inilah memunculkan ide pembentukan Pasukan Khusus. Pasukan Khusus akan dibentuk sebagai pasukan yang berjumlah sedikit tetapi memiliki mobilitas tinggi serta efektif dalam bertempur.

Karena keberadaan Pasukan Khusus semakin dibutuhkan, maka saat bertugas Alex Kawilarang tetap melanjutkan keinginannya yaitu membentuk Pasukan Khusus yang permanen. Selain itu dinamika dalam negeri juga berpengaruh, dimana tentara Indonesia harus melawan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah hal ini semakin menunjukkan bahwa Pasukan Khusus itu harus segera dibentuk. Pemberontakan yang berkaitan langsung dengan pembentukan Pasukan Khusus ini diantaranya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dan pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat.

Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia mulai terbentuk yang dilatarbelakangi oleh dinamika politik-militer dalam negeri. Kemudian Panglima Tentara Indonesia segera mengeluarkan perintah agar Pasukan Khusus yang tadinya hanya berada di bawah lingkup Teritorium III/Siliwangi untuk dibentuk secara nasional. Menindak lanjuti perintah itu maka dikeluarkan Surat Perintah Panglima No. 55/intr/PDS, surat itu berisikan tentang perintah pembentukan Pasukan Khusus dengan skala nasional.

Pada awal pembentukan sebanyak 27 orang perwira, bintara, dan tamtama menjadi anggota KESKO III/Siliwangi. Mereka bertugas sebagai staf operasi ada juga yang merangkap sebagai pelatih, kegiatan awal pembentukan Pasukan Khusus ini diawali dengan penyusunan staf pendidikan dan latihan untuk melatih kemampuan khusus berkualifikasi komando bagi prajurit-prajurit yang nantinya akan tergabung dalam Pasukan Khusus Indonesia. Guna membentuk Pasukan Khusus yang berkualitas Panglima TT III/Siliwangi meminta bantuan kepada Mayor. Rokus Bernandus Visser alias Moch. Idjon Djambi sebagai perancang grand design Pasukan Khusus Indonesia.

Karena pasukan komando tersebut dalam perkembangannya memerlukan pembinaan yang meliputi fasilitas, sarana, dan prasarana serta biaya yang cukup besar, hal ini akan mengakibatkan suatu kesulitan jika satuan ini berada di tingkat satuan Teritorium. Maka pada tahun 1953 atas pertimbangan hal tersebut, KESKO III/Siliwangi dialihkan statusnya menjadi di bawah pembinaan MABES AD dengan ditandai keluarnya Surat Keputusan KSAD No.3/KSAD/kpts/53 tanggal 14 Januari 1953. Dengan keluarnya surat keputusan ini menjadikan KESKO III/Siliwangi tidak lagi berada dibawah Teritorium III/Siliwangi melainkan menjadi di dalam pembinaan MABES AD.

Surat keputusan itu pula yang menjadikan dasar hukum perubahan nama dari KESKO III/Siliwangi menjadi Korps Komando Angkatan Darat (KKAD). Dengan adanya perubahan nama dan status ini, KKAD yang operasionalnya di bawah Markas Besar Angkatan Darat

mengadakan pembinaan organisasi dalam rangka penyesuaian tugas dan tanggung jawab KKAD. Namun dikarenakan situasi dan kondisi negara belum kondusif menjadikan KKAD memiliki tugas ganda selain membasmi pemberontakan yang masih terjadi KKAD juga harus menjalan pengamanan terhadap jalannya Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung dan pemilu tahun 1955.

KKAD yang semula berada dalam operasional MABES AD ditingkatkan keorganisasiannya menjadi setingkat Resimen yang berada di bawah satuan kerja MABES ABRI. Melalui Surat Keputusan Panglima Menteri Pertahanan No.25.265/MENHAN/kpts/1955 KKAD tidak lagi berada dalam operasional MABES AD, melainkan dibawah Komando Utama Tempur MABES ABRI. Berdasar pada surat keputusan itu dirubah pula nama kesatuan ini dari Korps Komando Angkatan Darat (KKAD) menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Pada upacara peresmian yang dipimpin langsung oleh panglima tertinggi ABRI yaitu Drs. Moch. Hatta sebagai inspektur upacara, ditunjuk sebagai komandan RPKAD yaitu Mayor Idjon Djambi dan Wakil Komandan Mayor R.E Djaelani. Dalam pembinaan MABES ABRI pasukan ini terus ditingkatkan kemampuannya baik secara jumlah personel maupun kualitasnya.

Dengan pemekaran organisasi ini menjadikan RPKAD sudah memiliki satuan tempur yang lengkap. Dengan demikian RPKAD sudah bisa menjadi bagian dari KOTAMA (Komando Tempur Utama) MABES ABRI kemudian status RPKAD ditingkatkan kembali menjadi Komando Tempur Utama. Setelah itu



RPKAD mengalami perubahan nama menjadi Komando Pasukan Sandhi Yudha (KOPASSANDHA) pada tahun 1971 dengan Komandan Jenderal, Brigjend. Yogie S.M. Nama KOPASSANDHA sendiri dipilih karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Komando Tempur Utama KOPASSANDHA melakukan operasi yang bersifat khusus dan rahasia.

Sebagai Pasukan Khusus yang mandiri tentunya KOPASSANDHA juga telah menjalankan tugas operasi militer sesuai dengan fungsinya sebagai pasukan tempur maupun menjalankan operasi militer non-tempur. Berikut merupakan operasi militer yang pernah dilaksanakan oleh KOPASSANDHA dalam kurun waktu tahun 1971 sampai dengan 1985:

### **Operasi Kemanusiaan Ekspedisi Lembah X di Irian Barat**

Pada tanggal 5 Mei 1972, Geussau seorang Antropolog Perancis kembali ke Irian untuk melanjutkan penelitiannya tentang suku lembah X yang belum sempat dia teliti, yang posisinya berada di Irian Barat. Untuk mempermudah jalannya penelitian Geussau menghadap kepada PANGDAM XVII/Tjendrawasih yaitu Brigjend TNI Sarwo Edhie Wibowo untuk meminta izin melakukan penelitian lanjutan sekaligus membuat film dokumenter. Kemudian PANGDAM meluluskan permintaan Geussau itu serta menjadikan penelitian dan pembuatan film dokumenter itu menjadi operasi kemanusiaan bakti KODAM XVII/Tjendrawasih.

Sehubungan dengan keputusan itu Brigjend Sarwo Edhie Wibowo

mengeluarkan Surat Perintah Operasi Nomer 009/SPR/Pangdam XVII tentang menerjunkan tim ABRI bersama kerabat kerja NBC ke lembah X untuk melakukan operasi kemanusiaan. Tim ini akan menghimpun dan menyusun data ilmiah dibidang etnologi dan antropologi budaya untuk bahan penelitian dan pengembangan. Sebagai tindak lanjutnya dibentuklah tim dibawah Komandan Kapten. Feisal Tanjungsi, dan Lettu Sintong Pandjaitan sebagai perwira operasi.

Walaupun tim operasi kemanusiaan ini sebagian besar adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang ekspedisi dan penjelajahan, namun nyatanya tidak serta merta membuat semuanya menjadi mudah dijalankan. Bahkan kondisi alam di Irian Barat ini baru pertama kali dihadapi oleh para peneliti antropologi, hal tersebut terbukti ketika tim ekspedisi mengalami tantangan yang sangat sulit dalam melakukan ekspedisi. Bahkan tim ini gagal membuat film dokumenter dan data penelitian seluruhnya hilang di sungai yang berarus sangat deras.

Operasi kemanusiaan pertama terhadap penduduk lembah X ini gagal karena seluruh dokumen dan film yang dibuat tersebut hilang. Namun pada 17 januari 1974 dilakukan ekspedisi ulang terhadap lembah X dengan tim militer yang berbeda namun dengan tim liputan NBC yang sama. Mereka bekerja selama 50 hari dan berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Dari penelitian dan ekspedisi inilah yang kemudian menghasilkan penelitian lanjutan oleh sekelompok ilmuwan juga wartawan di Mapenduma Papua.

### **Operasi Penumpasan Gerombolan Komunis di Kalimantan Barat oleh SATGAS 42/ KOPASSANDHA**

Pada saat Indonesia menganut asas NASAKOM (Nasionalis, Agamis dan Komunis), Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS), Tentara Nasional Kalimantan Utara dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) yang keseluruhannya berhaluan komunis diizinkan masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Mereka terdesak oleh operasi militer yang dilakukan oleh tentara kerajaan Inggris dan Malaysia di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat. Mereka membuat kantong-kantong pergerakan meskipun sering sekali menggunakan nama yang berbeda-beda namun kader mereka sama.

Setelah peristiwa G30S/PKI gerilyawan komunis Kalimantan Barat diperintahkan untuk menyerahkan senjata dan kembali ke Serawak. Sebagian diantara mereka ada yang mematuhi namun tidak sedikit juga yang menolak, mereka yang menolak kemudian melakukan perlawanan bersenjata kepada pemerintah. Pada tahun 1975, Organisasi Barisan Rakyat atau BARA yang merupakan fusi antara PGRS dan CDB PKI Kalimantan Barat di bawah pimpinan Achmad Sofyan menyerang gudang senjata AURI di Pangkalan Udara Sanggau Ledo.

Serangan dipimpin oleh Ju Lee seorang China Komunis dari Singkawang. Mereka berhasil menjarah 113 pucuk senjata yang sebagian besar terdiri dari senapan Chung buatan China, senapan serbu H&K G3, dua senapan berat kaliber 12,7 mm dan berpeti-peti amunisi. Jumlah senjata yang merekajarah adalah senjata untuk satu kompi pasukan, kemudian

gudang senjata AURI yang mereka kuasai dibakar habis dan mereka kembali ke dalam hutan.

Setelah mempelajari kegagalan dalam pelaksanaan operasi penumpasan gerombolan komunis, tim SATGAS 42 akhirnya menemukan formula baru dalam menjalankan operasi tersebut, strategi itu diberi nama dengan sandi "Operasi Garu". Filosofi garu diambil dari cara petani membajak sawah yang padat menjadi gembur agar bisa ditanami, garu itu sendiri berupa alat bajak berupa kuku besi semacam garpu yang berfungsi untuk menyisir bidang sawah. Dari filosofi ini konsep operasi garu dicetuskan, dimana pasuka pemburu akan bergerak maju sejajar seperti gerakan menyisir, diikuti pasukan lain dari belakang dengan interfal tertentu yang telah di tentukan.

Dengan gerakan seperti itu diharapkan gerombolan komunis tidak dapat meloloskan diri, seandainya mereka dapat meloloskan diri maka mereka akan bertemu dengan pasukan berikutnya yang bergerak maju. Harapannya dengan penerapan operasi garu ini dapat menangkap gerombolan komunis lebih banyak. Setelah pimpinan gerombolan komunis itu tewas dalam penyeragaman maka status di Kalimantan dinyatakan aman dan terkendali.

Selang dua hari dari pengumuman status aman di Kalimantan Barat, seluruh tim SATGAS 42 yang berada di hutan dan perbatasan ditarik kembali ke basis di KODAM XVII/Tandjungpura, setelah semua tim yang bertugas terkumpul maka operasi SATGAS 42 dinyatakan berakhir, dan seluruh anggota yang bertugas di kembalikan kembali ke MAKO KOPASSANDHA di Jakarta setelah kurang

lebih menjalankan tugas operasi selama 11 bulan di Kalimantan Barat menumpas gerombolan Komunis.

### **Operasi Pembebasan Sandera Pesawat Garuda DC-9-Woyla di Don Muang Thailand**

Pada tanggal 28 Maret 1981, pesawat DC-9 Woyla milik maskapai Garuda Indonesia yang berpenumpang 48 orang dalam penerbangan dari Bandar udara Internasional Kemayoran, Jakarta, menuju Polonia, Medan dibajak. Setelah pesawat itu transit di Bandara Simpang Tiga, Pekanbaru. Pilot pesawat Hermawan Rante ditodong dengan senjata dan dipaksa untuk menerbangkan pesawat keluar jalur penerbangan Indonesia, pesawat diterbangkan menuju Penang, Malaysia.

Di bandara Penang, pembajak meminta peta penerbangan menuju timur tengah, mengisi bahan bakar pesawat, dan perbekalan makanan, selanjutnya tepat pada pukul 16.05 pesawat yang dibajak lepas landas meninggalkan Penang. Pemerintah sempat menyesalkan tindakan pemerintah Malaysia yang begitu mudah membiarkan dan menuruti permintaan para pembajak pesawat Woyla itu, sebab jika mereka terbang lebih jauh akan semakin sulit pula dalam proses pembebasan atau pelaksanaan operasi militer.

Sempat muncul spekulasi bahwa pesawat akan terbang menuju Libya, namun ternyata pesawat mendarat di Bandara Don Muang, Thailand dan diparkir di spot A Apron Angkatan Udara Kerajaan Thailand di Bandara Don Muang. Pada saat itu seluruh jajaran teras ABRI sedang melaksanakan rapat pimpinan dan latihan gabungan ABRI di Maluku. Setelah

menerima laporan terjadinya pembajakan maka Asintel Kopkamtin Letjend. L.B Moerdani melapor kepada Panglima ABRI Jendral. M. Jusuf, kemudian Panglima ABRI memerintahkan untuk mengkoordinasikan penanggulangannya.

Senin tanggal 30 Maret lampu hijau operasi militer mulai jelas, Perdana Menteri Thailand Prem Tinsulanonda mengizinkan pihak Indonesia melakukan operasi. Hal itu disampaikan langsung oleh menteri pertahanan Thailand kepada Letjend Yoga Pramono sebagai perwakilan MABESTNI di Pusat Krisis Centre Bandara Don Muang. Namun demikian keputusan kapan dan jam berapa pelaksanaannya tetap berada di tangan pemerintah Thailand. Mendapat berita itu tim anti teror KOPASSANDHA langsung bersiap dan mengganti pakaian mereka dengan seragam militer, hal ini dilakukan selain operasi ini bersifat terbuka, juga untuk mempermudah mengenali mana kawan mana musuh saat operasi dilakukan.

Tepat pada pukul 02.40 operasi pembebasan dilakukan pada pesawat yang dibajak. KOPASSANDHA tak perlu waktu lama dalam melakukan pembebasan ini mereka hanya memerlukan waktu tiga menit untuk melakukan operasi tersebut. Namun operasi ini juga memakan korban baik dari pihak pembajak maupun dari pihak KOPASSANDHA tercatat yang menjadi korban adalah pilot pesawat Kapten. Herman Rante dan Capa. Ahmad Kirang.

Sedangkan dari pihak pembajak seluruhnya tewas di tempat. Berkat keberhasilan dalam melaksanakan operasi ini seluruh tim anti teror KOPASSANDHA mendapatkan penghargaan Anugerah Bintang Sakti dari Presiden Republik

Indonesia dan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat.

Kebudayaan yang tercipta dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi atau aktifitas sesama anggota masyarakatnya. sejarah muncul dan perkembangan Angklung Gubrag.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Keberadaan Pasukan Khusus sangat diperlukan oleh Negara Indonesia sebab dalam perkembangan dinamika politik-militer pasca Indonesia merdeka membuktikan bahwa Pasukan Khusus harus dimiliki oleh Indonesia guna menumpas gerakan separatis yang marak pada dekade tahun 1950-an. Melihat kondisi negara yang sedang terancam dengan maraknya aksi pemberontakan membuat pemerintah mau tidak mau harus melaksanakan operasi militer.

Namun operasi militer menimbulkan dampak jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Dari evaluasi operasi militer inilah memunculkan ide pembentukan Pasukan Khusus agar dapat meminimalisir korban jiwa dari para tentara Indonesia. Pasukan Khusus akan dibentuk sebagai pasukan yang berjumlah sedikit tetapi memiliki mobilitas tinggi serta efektif dalam bertempur. Kedua, Kemudian Panglima Tentara Indonesia segera mengeluarkan perintah agar Pasukan Khusus yang tadinya hanya berada dibawah lingkup Teritorium III/Siliwangi untuk dibentuk secara nasional. Menindak lanjuti perintah itu maka dikeluarkan Surat Perintah Panglima No. 55/intr/PDS yang berisikan tentang

perintah pembentukan Pasukan Khusus dengan skala nasional.

Pada awal pembentukan sebanyak 27 orang perwira, bintara, dan tamtama menjadi anggota KESKO III/Siliwangi. Guna membentuk Pasukan Khusus yang berkualitas Panglima TT III/Siliwangi meminta bantuan kepada Mayor. Rokus Bernandus Visser alias Moch. Idjon Djambi sebagai perancang grand design Pasukan Khusus Indonesia. Kemudian KESKO III/Siliwangi mengalami re-organisasi menjadi Korps Komando Angkatan Darat (KKAD) selanjutnya, KKAD dialihkan menjadi di bawah binaan MABES ABRI dan berganti nama menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

Setelah menjadi bagian dari Komando Tempur Utama (KOTAMA) MABES ABRI, RPKAD kembali mengalami perubahan nama menjadi Komando Pasukan Sandhi Yudha (KOPASSANDHA). Ketiga, Sebagai Pasukan Khusus yang mandiri tentunya KOPASSANDHA juga telah menjalankan tugas operasi militer sesuai dengan fungsinya sebagai pasukan tempur maupun menjalankan operasi militer non-tempur. Berikut merupakan operasi militer yang pernah dilaksanakan oleh KOPASSANDHA dalam kurun waktu tahun 1971 sampai dengan 1985 yaitu: Operasi kemanusiaan ekspedisi lembah X yang berada di Irian Barat dengan tujuan untuk melakukan penelitian tentang antropogi budaya oleh tim KOPASSANDHA bersama peneliti Perancis sekaligus sebagai Operasi Bhakti KODAM XII/Tjendrawasih.

Kemudian operasi militer penumpasan gerombolan komunis di Kalimantan Barat. Operasi ini dilakukan karena Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS), Tentara Nasional Kalimantan Utara dan Pasukan

Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) yang keseluruhannya berhaluan komunis diizinkan masuk ke wilayah Kalimantan Barat pada saat Indonesia masih menganut asas NASAKOM. Mereka terdesak oleh operasi militer yang dilakukan oleh tentara kerajaan Inggris dan Malaysia di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat. Setelah peristiwa G 30 S/PKI mereka diminta penyerah kepada pemerintah namun sebagian kelompok komunis itu menolak dan melakukan perlawanan bersenjata, sehingga pemerintah harus menjalankan operasi militer untuk menumpasnya.

Selanjutnya adalah operasi pembebasan sandera pesawat Garuda Indonesia DC-9-WOYLA di Bandara Don Muang, Thailand. Peristiwa ini berawal dari pembajakan pesawat oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai gerakan Islam murni yang beranggotakan lima orang. Pesawat dibajak pada tanggal 28 Maret 1981 kemudian dilaksanakan operasi pembebasan sandera pada tanggal 30 Maret 1981 pukul 2.40 dini hari. Operasi ini berhasil menyelamatkan seluruh sandera, namun terdapat dua korban yaitu anggota KOPASSANDHA dan pilot pesawat, sedangkan seluruh pembajak tewas dalam operasi tersebut

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. dkk. (1996). *Kemal Idris: Bertarung dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cribb, R. (2010). *Para Jago Kaum Revolusioner 1945-1949*. Jakarta: Masup Jakarta.
- Daliman, A. (2012). *Metologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Dirdjosisworo, S. (1994). *Siliwangi dari Masa ke Masa Edisi Ke III Esa Hilang Dua Terbilang Buku Ke I (1946-1949)*. Bandung: Granesia.
- Disjarah, TNI AD (1978). *Sejarah TNI-AD 1945-1973: Pertumbuhan TNI AD dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan NKRI*: Dinas Penerangan TNI AD.
- Disjarah TNI AD (2015). *59 TH KOPASSUS Mengabdikan untuk NKRI*. Bandung: Cipta Graha Kreasi.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Imran, A. (1983). *Urip Sumohardjo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Ismaun. (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung.
- Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Pers.
- Israr, H. (2010). *Kolonel. Alex Kawilarang untuk Sang Merah Putih*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Langlois, CH.V., & Seignobos. CH. (2015) *Introduction to the Study of History*. Terjemahan Supriyanto Abdullah. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Matanansi, P. (2008). *Pasukan Khusus Pengukir Sejarah di Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Pusjarah dan Tradisi TNI. (2000). *Sejarah TNI, Jilid I (1945-1949)*. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
- Ricklefs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Shundaussen, U. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3S.
- Wadlaw, G. (2006). *Political Terrosim*. Jakarta: Cambridge University Press.
- Wiharyanto, A. K. (2011). *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.